

BUKU SAKU

REFORMASI BIROKRASI



Setjen DPR RI
“Berkomitmen mensukseskan
Reformasi Birokrasi
di Lingkungan
Sekretariat Jenderal DPR RI”

BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
BIRO ORGANISASI DAN PERENCANAAN
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar
- Apa yang dimaksud dengan Reformasi Birokrasi
- Dasar Hukum Pelaksanaan
- Latar Belakang Perlu Reformasi Birokrasi
- Tujuan Reformasi Birokrasi
- Tujuan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi
- Sasaran Reformasi Birokrasi
- Makna Reformasi Birokrasi
- Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
- Road Map RB
- *Quick Wins*/Program Percepatan
- Agen Perubahan
- Zona Integritas
- Program Kegiatan RB Tahun 2022
- Hasil Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) Setjen DPR RI Tahun 2021
- Hasil Antara
- Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2020
- Rekomendasi Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2021
- Daftar Penghargaan



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga terselesaikannya dengan baik Buku Saku Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

Reformasi Birokrasi dibangun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemahaman yang mendalam tentang Reformasi Birokrasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Buku saku ini disusun dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Reformasi Birokrasi agar dapat mendukung proses pelaksanaannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Agustus 2022
Sekretaris Jenderal DPR RI

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si

APA YANG DIMAKSUD DENGAN REFORMASI BIROKRASI

Secara umum **Reformasi Birokrasi** adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif)

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

01 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*

02 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*.



LATAR BELAKANG PERLU REFORMASI BIROKRASI

01. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini
02. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik
03. Tingkat efisiensi, efektifitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan
04. Tingkat transparansi dan akuntabilitas masih rendah
05. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai masih rendah

TUJUAN REFORMASI BIROKRASI



Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

TUJUAN JANGKA PANJANG REFORMASI BIROKRASI



***MENJADI PEMERINTAHAN
BERKELAS DUNIA***



SASARAN REFORMASI BIROKRASI



- **BIROKRASI YANG BERSIH,
AKUNTABEL DAN BERKINERJA**



- **BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN**



- **BIROKRASI YANG MEMILIKI
PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK
DAN BERKUALITAS**





MAKNA REFORMASI BIROKRASI

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan
2. Pertaruhan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21
3. Proses yang tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, yang melibatkan jutaan pegawai, dan anggaran yang tidak sedikit
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

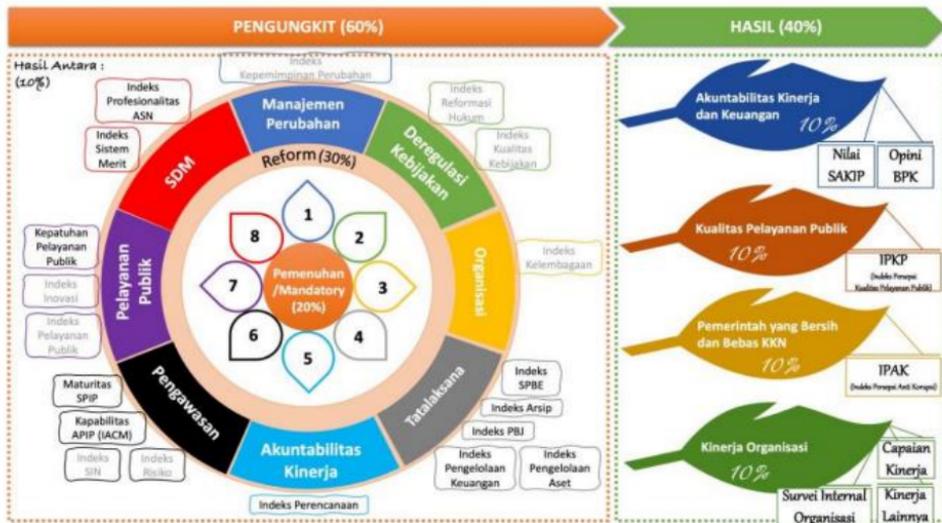


FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI (8 AREA PERUBAHAN)

- 01 Manajemen Perubahan**
Birokrasi yang berintegrasi dan berkinerja tinggi
- 02 Deregulasi Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan**
Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan harmonis serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
- 03 Penataan Organisasi**
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)
- 04 Penguatan Tata Laksana**
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip *good governance*
- 05 Penguatan Sistem Manajemen SDM**
SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, netral dan sejahtera
- 06 Penguatan Akuntabilitas**
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
- 07 Penguatan Sistem Pengawasan**
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- 08 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta dunia usaha



KOMPONEN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI



ROAD MAP RB

Road Map atau peta jalan pelaksanaan RB Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Persekjen DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 dan disusun berdasarkan PemenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* RB Tahun 2020-2024 serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB Tahun 2010-2025.

Road Map RB yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan rencana rinci pelaksanaan RB berkelanjutan dari tahapan ke tahapan berikutnya sehingga target kinerja dan kegiatan tahun per tahun akan jelas dan terukur.

QUICK WINS / PROGRAM PERCEPATAN

Quick Wins atau sering disebut *low-hanging fruit* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.

Quick Wins merupakan salah satu upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan *quick wins* diharapkan terjadi perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, tugas pokok fungsi dan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga.



KRITERIA DALAM MERUMUSKAN *QUICK WINS*

- 01 Berasal dari program RB, yang terdapat di *Road Map* RB;
- 02 Bagian utama (*core business*) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Setjen sebagai *supporting system* DPR RI;
- 03 Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan internal DPR RI dan eksternal masyarakat umum serta pasangan kerja DPR RI;
- 04 Aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama internal dan eksternal Setjen DPR RI.

Program *Quick Wins* Setjen DPR RI pada tahun 2022 adalah Sistem Informasi Risalah (SIRIH) dan Isu Sepekan.

AGEN PERUBAHAN

Agen Perubahan merupakan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan staf yang dapat menggerakkan perubahan di lingkungan kerja, sekaligus berperan sebagai teladan bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi.

Agen Perubahan disebut sebagai Katalis, Penggerak Perubahan, Pemberi Solusi, Mediator, dan Penghubung.

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggungjawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

KRITERIA AGEN PERUBAHAN

1. Berstatus PNS;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
3. Bertanggung jawab;
4. Taat Aturan dan Disiplin;
5. Memiliki kemampuan memberikan pengaruh positif; dan
6. Inovatif proaktif.

Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret.

Terdapat 22 Agen Perubahan terpilih untuk Tahun 2022 yang merupakan perwakilan dari unit Eselon 2 Setjen DPR RI.





AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Agus Supriyono, S.S., M.A.P.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelatihan Pusdiklat
2	Pusat Teknologi Informasi	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.	Peningkatan Layanan Pusat Teknologi Informasi Melalui Sistem Periset <i>Password</i> Mandiri (Sipreman)
3	Biro Persidangan I	Nofia Dewita, S.S., M.Si.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persidangan Paripurna Melalui Penyusunan Berita Acara Serah Terima Bahan Rapat Paripurna dari Manual ke Digital
4	Biro Persidangan II	Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Persidangan Pansus Melalui Penyempurnaan <i>Website</i> Pansus
5	Biro Set. Pimpinan	Dian Arivani, S.E., M.S.M.	Peningkatan Karakter ROPIM Menuju <i>Service Excellence</i> , Melalui Forum SATTRIA (Santai, Terukur, Inspiratif dan Andal)
6	Biro KSAP dan OI	Rifan Rachman Safari	Membangun Budaya Inovatif dengan Semangat Bangkit Pasca Safari

		Andalas, S.Sos., M.H.	Pandemi COVID-19 Melalui <i>One-On-One Interview</i> Di Biro KSAP dan OI
7	Biro Protokol dan Humas	Sulistiyono, S.Sos., M.Si	Peningkatan Layanan Keprotokolan Kepada Pimpinan dan Anggota DPR Serta Pejabat Setjen DPR Melalui Kerja Sama dengan PT.Citilink
8	Biro Pemberitaan Parlemen	M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.	Mewujudkan Konvergensi Media Melalui <i>News Room</i> DPR RI: Berpacu Menuju Parlemen <i>Modern</i>
9	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Sri Mulyani, S.H.	Peningkatan Pemahaman ASN di Biro Hukum dan Dumas Terhadap Pelaksanaan Tupoksi dan Capaian (<i>Output</i>) Kinerjanya Melalui Kegiatan <i>Briefing</i> Mingguan
10	Biro Sumber Daya Aparatur	Ida Nuryati, S.Sos., M.A.	Sosialisasi Peraturan Dan Layanan Kepegawaian Bagian MKIASN Melalui <i>Pop-Up</i> di Sirajin
11	Biro Keuangan	Dicky Firmansyah, S.Sos.	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Melalui Sistem Loker Perjalanan Luar Negeri (Optimalisasi Aplikasi Perjalanan Dinas <i>Online</i>)
12	Biro Umum	Bambang Soleh	Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI



		Zulfikar, SKM.	
13	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	Dina Khairani, S.T	Optimalisasi Layanan Perjaka Untuk Penghuni RJA DPR RI Kalibata
14	Biro Organisasi dan Perencanaan	Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak	Implementasi Aplikasi SIREVI dalam Mendukung Menuju Parlemen <i>Modern</i>
15	Pusat Perancangan Undang- Undang	M. Nurfaik, S.H.I.	Pemublikasian Info Legislasi di Website dan Media Sosial Pusat PUU
16	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang	Ira Chandra Puspita, SH., M.H.	Penguatan Budaya Kerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang
17	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang	Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.	Peningkatan Dukungan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- Undang

18	Pusat Kajian Anggaran	Ade Nurul Aida, S.E.	Peningkatan Layanan Dukungan Keahlian Pusat Kajian Anggaran (PKA) Melalui Pengembangan Sistem Informasi Forum AKD Dan Mitra Kerja (SIMFONI) DPR RI
19	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	Dian Setiono, S.Sos.	Satu Data AKN
20	Pusat Penelitian	T. Ade Surya, S.T., M.M.	Peningkatan Dukungan Keahlian Melalui Analisis Substansi Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain (<i>Foreign Legislation Analysis</i>)
21	Inspektorat I	Mikael Abubakar, S.E., QGIA	Melakukan <i>Survey</i> Penerapan Kode Etik Auditor dan Kepuasan Pelanggan di Lingkup Inspektorat I
22	Inspektorat II	Margaretha Susanti, S.E., QGIA	<i>Wednesday Reform</i> dan Penandatanganan Pakta Integritas



ZONA INTEGRITAS

Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai **komitmen** untuk **mewujudkan WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal **pengecahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik**

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 543/SEKJEN/2022, unit kerja yang akan melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yaitu:

1. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
3. Biro Persidangan II; dan
4. Pusat Kajian Anggaran.

Sedangkan unit kerja yang akan melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yaitu:

1. Biro Persidangan I;
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;

5. Pusat Teknologi Informasi; dan
6. Pusat Perancangan Undang-Undang.

MEKANISME PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas;
2. Instansi Pemerintah menetapkan unit kerja yang akan dijadikan ZI menuju WBK/WBBM;
3. Unit kerja yang ditetapkan untuk ZI melakukan penetapan program Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM mengacu pada pemenuhan kriteria indikator WBK/WBBM (Indikator Pengungkit dan Hasil);
4. Tim Penilai Internal (TPI) melakukan pendampingan dan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI berjalan sesuai dengan yang direncanakan;
5. TPI melakukan penilaian atas hasil Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM yang dilakukan;
6. Apabila hasil Penilaian TPI, unit kerja dinyatakan berhasil memenuhi predikat WBK/WBBM, unit kerja tersebut diajukan kepada Kementerian PANRB, selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan evaluasi.





KOMPONEN PENILAIAN ZONA INTEGRITAS



PROGRAM KEGIATAN RB TAHUN 2022

1. Penguatan Manajemen Perubahan

- a Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
- b Penguatan Nilai Integritas
- c Pengembangan dan Penguatan Agen Perubahan dan *Role Model*
- d Pengembangan Budaya Kerja dan Cara Kerja yang Adaptif dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0

2. Deregulasi Kebijakan

- a Identifikasi dan Pemetaan Regulasi dengan melakukan pemetaan keterkaitan Peraturan Setjen DPR RI dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi dan yang sejajar
- b Deregulasi Aturan yang Menghambat/Tidak Harmonis/Tidak Sinkron
- c Penguatan Sistem Regulasi Nasional
- d Perencanaan Kebijakan
- e Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- a *Assesment* organisasi berbasis kinerja
- b Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil *assesment*
- c Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi

4. Penataan Tata Laksana

- a Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP)
- b Penerapan Tata Kelola SPBE
- c Penerapan Manajemen & Layanan SPBE



- d Arsip
- e Keuangan dan Perencanaan
- f Aset
- g Pengelolaan Keuangan Secara Tepat dan Sesuai Aturan

5. Penataan SDM Aparatur

- a Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi berdasarkan Sistem Merit
- b Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN
- c Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- d Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka
- e Penetapan Kinerja Individu
- f Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
- g Sistem Informasi Kepegawaian

6. Penguatan Akuntabilitas

- a Melakukan reviu terhadap beberapa IKU agar lebih dapat menggambarkan kinerja unit secara menyeluruh
- b Menyusun Rencana Aksi Kinerja atas PK dan mengunggah ke esr.menpan.go.id
- c Mengoptimalkan monev capaian kinerja secara periodik atas Rencana Aksi dan menjadi dasar untuk pemberian *reward* dan *punishment*
- d Mereviu Kembali target PK agar sesuai dengan capaian sebelumnya
- e Menggunakan Laporan Kinerja tahun sebelumnya sebagai landasan penentuan target tahun berikutnya.
- f Mengembangkan aplikasi SINCAN atau integrasi dengan aplikasi sejenis untuk pengukuran dan pemantauan kinerja

7. Penguatan Pengawasan

Melakukan identifikasi Komponen dan Sub Komponen Penilaian pada LKE RB yang terdiri dari:

Komponen Pengungkit

1 Pemenuhan

- a Pengendalian Gratifikasi
- b Penerapan SPIP
- c Pengaduan Masyarakat/*Whistle Blowing System*
- d Benturan Kepentingan
- e Pembangunan Zona Integritas
- f Peran APIP

2 Hasil Antara

- a Indeks *Internal Audit Capability Model* (IACM)
- b Maturitas SPIP

3 Reform

- a Penyampaian Laporan harta kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
- b Penyampaian Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- c Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)
- d Peran APIP

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melakukan identifikasi Komponen dan Sub Komponen Penilaian pada LKE RB yang terdiri dari:

Komponen Pengungkit

1 Pemenuhan

- a Penguatan Standar Pelayanan
- b Penguatan Budaya Pelayanan Prima
- c Penguatan Pengelola Layanan Pengaduan



- d Peningkatan Kepuasan Terhadap Pelayanan
- e Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 2 **Hasil Antara**
 - Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
- 3 **Reform**
 - a Upaya dan/atau Inovasi Telah mendorong Perbaikan Pelayanan Publik
 - b Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi

HASIL PENILAIAN MANDIRI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) SETJEN DPR RI TAHUN 2021

Indeks RB Setjen DPR RI berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2021 atas pelaksanaan RB pada 8 (delapan) area perubahan, adalah **77,19** dengan kategori “BB”, dengan rincian:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	18,32	18,32
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,98	5,76
	III. <i>Reform</i>	30,00	22,24	21,10
	Total Komponen Pengungkit	60,00	47	45,18
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,52	7,54
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,88	8,57
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,08	8,49
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,63	7,41
	Total Komponen Hasil	40,00	30,10	32,01
	Indeks RB (Pengungkit + Hasil)	100,00	76,63	77,19

HASIL ANTARA

Ada sebanyak 11 (sebelas) Hasil Antara yang telah dilakukan pengukuran oleh instansi lain sebagai *leading sector*, yakni:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	291,50	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	34,82	Lembaga Administrasi Negara
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3,17	Kementerian Keuangan
4.	ASN Profesional	0-100	40,54	Badan Kepegawaian Negara
5.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,84	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	20,00	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	88,10	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,35	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	73,08	Arsip Nasional Republik Indonesia



TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI KEMENPAN RB TAHUN 2020

Rekomendasi perbaikan yang disampaikan pada hasil evaluasi tahun 2020 telah ditindaklanjuti oleh Setjen DPR RI, yakni:

- a. Telah melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap program dan rencana aksi dari agen perubahan;
- b. Telah menetapkan peta proses bisnis sesuai dengan struktur baru melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021;
- c. Telah melaksanakan *assessment* terhadap pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI dan mengirimkan hasil *assessment* kepada Kapusdiklat untuk menindaklanjuti *gap* kompetensi terhadap pegawai;
- d. Telah menyelesaikan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan pengangkatan pada pejabat fungsional;
- e. Telah meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja hal tersebut dapat terlihat dari jumlah pengusulan unit kerja pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020.

REKOMENDASI HASIL EVALUASI KEMENPAN RB TAHUN 2021

Hasil evaluasi KemenPAN RB untuk pelaksanaan RB Tahun 2021 memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti di tahun 2022 ini yakni:

1. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja

- yang telah diinternalisasi atau disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
2. Menyusun laporan akhir pelaksanaan *quick win* yang disertai dengan pemanfaatannya oleh *stakeholder*;
 3. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Setjen DPR sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan *Master Plan SPBE Nasional*;
 4. Menyusun mekanisme hubungan antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan pejabat fungsional;
 5. Menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
 6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas seluruh aplikasi yang telah dibangun sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai dan melakukan integrasi aplikasi yang memiliki fungsi yang sama;
 7. Menggunakan laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai landasan dalam penetapan dokumen perencanaan tahun berikutnya dan penentuan target kinerja;
 8. Meningkatkan *monitoring* dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
 9. Meningkatkan efektifitas pengawasan internal pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP.

Daftar Penghargaan



1. Piagam Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat "BAIK".
2. Piagam Penghargaan Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik II Tahun 2021 Kategori Lembaga Negara.
3. Predikat WBK 2021 dari Kemenpan RB untuk unit kerja Pusat Kajian Anggaran dan Biro Persidangan II.
4. Penghargaan sebagai "JUARA II" Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (*Continuous Improvement*).
5. Penghargaan WTP sebanyak 12 kali berturut-turut.
6. Penghargaan dengan kategori "Memuaskan" sebagai peringkat VII tingkat Lembaga Negara berdasarkan hasil pengawasan kearsipan Tahun 2021.
7. Penghargaan Silver Winner Website PPID Terinovatif.
8. Penghargaan Silver Winner Kategori Government PR.
9. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik memperoleh nilai 96,52 dengan kualifikasi "Informatif".
10. Penghargaan sebagai pemenang pada GSM Award 2021 untuk kategori *Best Collaboration*.
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI mendapatkan Akreditasi B atas Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS.
12. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI sebagai lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dengan kategori "Bintang satu" dengan masa berlaku 5 Tahun.
13. Penghargaan sebagai Mitra lembaga pemerintah dengan desain program terbaik di "Program Magang Kampus Merdeka".
14. Perpustakaan DPR RI mendapatkan Akreditasi A dengan nilai tertinggi 95,46 .



@rbsetjendpr



rb.dpr.go.id